

## BAB V

### PENUTUP

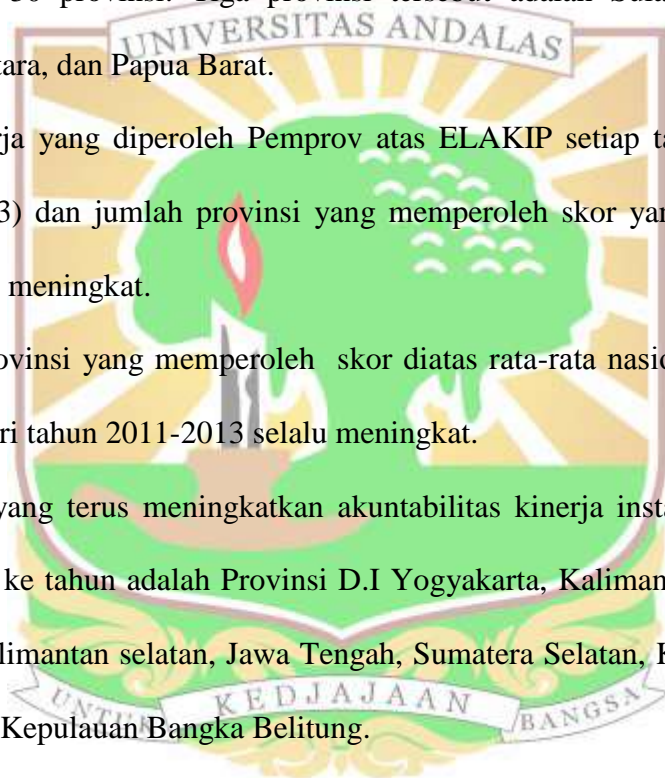
#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

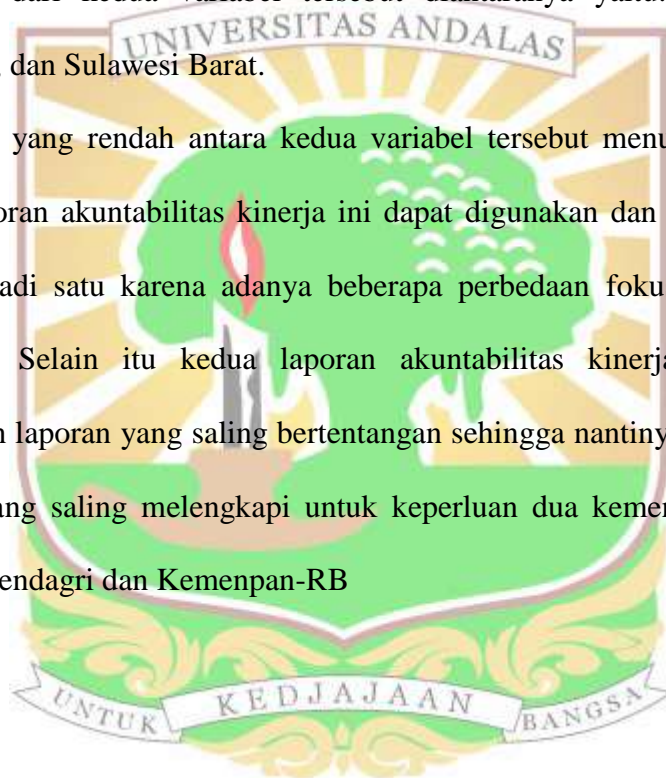
- a. Hasil EKPPD Pemerintah Provinsi sebagian besar sudah mencapai kategori tinggi yaitu berada diatas 2, hal ini berarti bahwa Pemprov telah memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan yang sudah cukup baik.
- b. Hasil EKPPD Pemerintah provinsi menurun pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 sebesar 0,0443, dan meningkat kembali skornya di tahun 2013 menjadi 2,3353.
- c. Provinsi Jawa Timur secara konsisten telah menyusun LPPD dengan baik hal ini dibuktikan dengan Jatim selalu menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh hasil EKPPD dengan kategori “Sangat Tinggi” dan menjadi peringkat EKPPD terbaik nasional secara berturut-turut dari tahun 2011-2013.
- d. Provinsi yang memiliki perkembangan hasil EKPPD sangat baik dari tahun ke tahun dari tahun 2011-2013 baik dari sisi skor, status, maupun peringkat diantaranya adalah: Provinsi Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.
- e. Tiga provinsi yang memiliki peningkatan kinerja yang cukup tajam dari tahun 2011 ke 2012 atas hasil EKPPD Pemprov, namun menurun drastis kinerjanya

pada tahun 2013, diantaranya adalah: Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

- f. Tiga Provinsi yang memiliki status dan peringkat yang terburuk atas EKPPD dari tahun 2011-2013 adalah provinsi Bali, Papua, dan Maluku Utara.
- g. Jumlah provinsi dalam evaluasi LAKIP oleh Kemenpan-RB di tahun 2012 meningkat menjadi 33 provinsi dibandingkan tahun 2011 yang hanya berjumlah 30 provinsi. Tiga provinsi tersebut adalah Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.
- h. Skor kinerja yang diperoleh Pemprov atas ELAKIP setiap tahun meningkat (2011-2013) dan jumlah provinsi yang memperoleh skor yang baik tersebut juga selalu meningkat.
- i. Jumlah provinsi yang memperoleh skor diatas rata-rata nasional (skor “CC” ke atas) dari tahun 2011-2013 selalu meningkat.
- j. Pemprov yang terus meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari tahun ke tahun adalah Provinsi D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur Jawa Timur, Kalimantan selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, dan Kepulauan Bangka Belitung.
- k. Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara adalah 2 provinsi yang mengalami penurunan peringkat yang sangat drastis dari tahun 2011 ke tahun 2012, dan berhasil meningkatkan kembali peringkat evaluasi LAKIP mereka secara nasional di tahun 2013.



- l. Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua adalah 3 provinsi yang selalu mendapatkan peringkat terendah dengan skor yang masih buruk yaitu “C” atas ELAKIP setiap tahunnya (2011-2013).
- m. Terdapat hubungan yang rendah dengan arah hubungan positif antara variabel hasil EKPPD dengan variabel hasil ELAKIP Pemerintah Provinsi di Indonesia hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksinkronan beberapa provinsi atas hubungan dari kedua variabel tersebut diantaranya yaitu: provinsi Bali, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
- n. Hubungan yang rendah antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa kedua laporan akuntabilitas kinerja ini dapat digunakan dan tidak dapat kita buat menjadi satu karena adanya beberapa perbedaan fokus penilaian dari keduanya. Selain itu kedua laporan akuntabilitas kinerja ini bukanlah merupakan laporan yang saling bertentangan sehingga nantinya dapat menjadi laporan yang saling melengkapi untuk keperluan dua kementerian tersebut, yaitu Kemendagri dan Kemenpan-RB



## 5.2 SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Untuk seluruh pemerintah provinsi terutama provinsi Bali, Papua, dan Maluku Utara diharapkan dapat terus memperbaiki kualitas laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsinya agar tahun-tahun berikutnya seluruh

provinsi yang dievaluasi LPPD provinsinya sudah bisa berstatus “Tinggi” dan provinsi yang berstatus “Sangat tinggi” tidak hanya satu provinsi saja.

- b. Untuk kepala daerah dan seluruh pegawai instansi provinsi Jawa Timur sekiranya dapat terus menjaga komitmen untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi yang sejalan dengan tujuan dan program yang akuntabel agar dapat terus mempertahankan status EKPPDnya.
- c. Kepada pemerintah provinsi Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengukur kinerja provinsinya, agar dapat lebih mengetahui ketercapaian tingkat kinerja daerahnya masing-masing sehingga kedepannya dapat meningkatkan status provinsinya menjadi status yang lebih baik yaitu dengan status “Sangat tinggi”.
- d. Kepada Kepala Daerah provinsi Sumbar, Kalteng, dan Sulteng diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan seluruh bawahannya guna mendorong kinerja SKPD agar dapat meningkatkan peringkat EKPPD provinsinya masing-masing dan usahakan untuk tidak mengalami penurunan peringkat lagi untuk tahun-tahun berikutnya.
- e. Untuk seluruh pemerintah provinsi, terutama provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat diharapkan harus terus memperbaiki penerapan SAKIP dan capaian kinerja provinsinya untuk meningkatkan hasil evaluasi atas LAKIP di tahun-tahun berikutnya, sehingga rata-rata hasil evaluasi LAKIP yang masih “CC” dapat terus ditingkatkan, dan tidak ada lagi provinsi yang mendapat skor “C”.

f. Kepada pemerintah provinsi D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur Jawa Timur, Kalimantan selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara diharapkan agar dapat meningkatkan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja. Dengan demikian pengukuran keberhasilan dan kegagalan sasaran yang ditetapkan dapat terukur dengan baik, sehingga masing-masing Pemprov dapat menjadikannya sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya dalam meningkatkan skor hasil ELAKIPnya.

g. Adanya korelasi antara hasil EKPPD dengan hasil ELAKIP Pemerintah provinsi menunjukkan sudah terintegrasinya antara sistem pelaporan kinerja instansi yang menghasilkan LPPD dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menghasilkan LAKIP Pemprov meskipun integrasinya masih relatif rendah. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dan integrasi yang lebih atas sistem pelaporan pertanggungjawaban kinerja ini, sehingga nantinya laporan yang dihasilkan akan sejalan.

### 5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua bentuk hasil evaluasi yang berbeda dimana hasil EKPPD yang dipublikasi Kemendagri telah berupa kategori peringkat yang di ikuti penjelasan skornya. Dimana range skor yang diberikan yaitu antara 0-4. Skor 0 diberi peringkat rendah (R), skor 1 diberi peringkat sedang (S), skor 2 dengan peringkat tinggi (T), skor 4-3 dengan peringkat sangat tinggi (ST) . Sedangkan hasil ELAKIP yang dipublikasikan Kemenpan-RB hanya

menghasilkan peringkat dengan kode huruf dimana AA berarti memuaskan, A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik), C (agak kurang), dan D (kurang) tanpa menjelaskan nilai *absolute* dari kode huruf tersebut. Sehingga untuk mengkorelasikan kedua variabel tersebut peneliti memberikan skala pengukuran sendiri, yang mungkin saja menjadikan bias atas hasil korelasi kedua variabel ini. Untuk itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal yang sama agar dapat menggunakan hasil ELAKIP dengan angka *absolute*.

